

Fitra Didesak Beber Bukti

Tribun Pontianak

SELASA
2 OKTOBER 2012

■ Kajati Tak Yakin Kalbar 5 Besar Korupsi ■ BPK Kalbar Heran dengan Data Fitra

” Sama sekali tidak ada muatan politis. Karena itulah, Fitra merilis data ini setelah Pemilukada Kalbar, bukan pada saat Pemilukada. ”

UCHOK SKY KHADAFI

Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra

PONTIANAK, TRIBUN - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir data mengejutkan, Senin (1/10). Kalbar masuk 5 besar provinsi terkorup di Indonesia setelah Papua, Sumatera Utara, Aceh, dan DKI Jakarta.

Kalangan DPRD Kalbar pun mendesak Fitra membuktikan tuduhan tersebut agar tidak menjadi preseden buruk bagi kinerja Pemprov Kalbar. “Be-



TRIBUN/DOK



TRIBUN/DOK

” Kita sudah terima *progress report* BPK. Tidak ada kerugian negara dalam laporan keuangan Pemprov Kalbar pada semester II tahun 2011. ”

NICODEMUS R TOUN

Wakil Ketua DPRD Kalbar

nar, Kalbar berada di posisi 5 provinsi terkorup dengan kerugian negara Rp 289,8 miliar dari 334 kasus. Data ini kita peroleh dari hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) Semester II tahun 2011,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, kepada *Tribun*.

Berdasarkan rilis Fitra yang dikirim ke sejumlah media massa, kerugian negara di DKI

Jakarta mencapai Rp 721,5 miliar dengan 715 kasus, Aceh Rp 669,8 miliar dengan 629 kasus, Sumatera Utara Rp 515,5 miliar dari 334 kasus, dan Papua

■ Bersambung ke Hal 7

Fitra Didesak Berber Bukti

dengan kerugian negara Rp 476,9 miliar dari 281 kasus.

Sementara posisi terakhir, atau 33 dihuni Bangka Belitung dengan kerugian negara Rp 1,9 miliar. "Untuk 33 provinsi ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,1 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 9.703 kasus," ucap Uchok.

Kerugian negara tersebut menurutnya, baru diolah dari sekitar 20 persen dan 100 persen data audit yang dimiliki BPK. "Bayangkan berapa kerugian negara jika 100 persen," ujarnya.

Uchok membantah rilis Fitra ini bermuatan politis. Menurutnya, ini sebagai bentuk partisipasi Fitra sebagai warga negara untuk ikut mengawasi pengelolaan keuangan negara. Baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

"Sama sekali tidak ada muatan politis. Karena itulah, Fitra merilis data ini setelah Pemilihan Kalbar, bukan pada saat Pemilihan. Padahal, datanya sudah lama kita punya. Kecuali, untuk Aceh dan Sumatera Utara yang sudah lebih dulu kita ekspose," paparnya.

Ia pun mengaku siap jika Fitra diminta datang ke Kalbar untuk berdiskusi dan menjelaskan data-data yang dimiliki. "Kenapa takut. Ini tanggungjawab kita sebagai masyarakat. Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Nanti sumber datanya kita akan perlihatkan juga," tegas Uchok.

Uchok menyebut mengungkap data korupsi untuk kebutuhan cara pengelolaan keuangan daerah yang masih jelek. Sebab meskipun ada peraturan pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), masih ditemukan para pejabat mengambil kebijakan yang menyelewengkan kewenangannya.

"Ironisnya, legislatif yang memiliki hak budgeting sama kuat dengan DPRD, memilih tidak berkonfrontasi. Sehingga fungsi pengawasan menjadi lemah. Malah, bersama-sama mengeruk uang rakyat di APBD untuk kepentingan pribadi dan kelompok," ujar Uchok.

Persoalan ini terjadi karena masih ada paradigma tradisional pembuat kebijakan. Kasus untuk pajak yang dipungut daerah misalnya, daerah merasa pihak lain termasuk publik tidak perlu tahu.

"Kita tidak pernah tahu pengusaha A dan B, berapa besar bayar pajaknya. Kemudian dialokasikan untuk apa dan siapa yang bertanggungjawab. Jadi, tidak ada transparansi pengelolaan keuangan

negara. Peluang inilah yang kerap dijadikan oknum tertentu mengambil keuntungan," katanya.

Rilis Fitra ini memantik tanda tanya di kalangan DPRD Kalbar. Wakil Ketua DPRD Kalbar, Nicodemus R Toun, misalnya mengaku data yang dirilis Fitra tidak sesuai dengan data yang sudah ia terima dari BPK RI Kalbar. "Kita sudah terima *progress report* BPK, Jumat kemarin. Tidak ada kerugian negara dalam laporan keuangan Pemprov Kalbar pada semester II tahun 2011," ujarnya.

Karena itulah, politisi Demokrat ini meminta Fitra memberikan bukti-bukti tindak pidana korupsi yang dilirisnya. "Dari mana datanya, mana buktinya. Tolong tunjukkan," tegas Nicodemus.

Pembuktian data-data yang disampaikan Fitra menurut Nicodemus menjadi penting agar tidak muncul opini di masyarakat yang merugikan Pemprov Kalbar.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Retno Pramudya juga meminta Fitra tidak segan-segan mengungkap datanya ke publik. Khususnya untuk Kalbar, masyarakat perlu tahu rincian kasus korupsi yang menyebabkan Kalbar berada di peringkat kelima versi Fitra.

Terkait klaim Fitra yang menggunakan temuan BPK sebagai acuan, Retno tidak sepenuhnya sependapat. Sebab temuan BPK, belum bisa dikatakan sebagai korupsi. Temuan itu masih bisa ditindaklanjuti dengan pengembalian kerugian negara.

Tapi setidaknya, kata Retno, apa yang diungkap Fitra perlu disikapi sebagai *warning*, khususnya bagi pejabat dan penegak hukum di Kalbar. "Tidak bisa dinafikan juga bahwa korupsi di Kalbar ini masih ada," ujar legislator asal Partai Persatuan Pembangunan ini.

Retno mengatakan, pejabat di Kalbar harus menyikapi temuan tersebut dengan semakin menjauhkan diri dari perbuatan korupsi. "Anggaran pemerintah, harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk dikorupsi," katanya mengingatkan.

Sementara bagi penegak hukum, hal itu harus menjadi pemicu semakin menggiatkan upaya pemberantasan korupsi di Kalbar. "Kasus-kasus korupsi yang mandek, harus dilanjutkan hingga tuntas," desak Retno.

BPK Heran Data Fitra

Pihak BPK RI Perwakilan Kalbar pun heran dengan data

yang dikeluarkan oleh Fitra. Sebab dari hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah daerah se-Kalbar selama 2011, nilai kerugiannya hanya sekitar Rp 23,5 miliar.

Angka tersebut jauh berbeda dengan rilis Fitra yang menyebutkan kerugian mencapai Rp 289 miliar. Apalagi hanya di semester kedua 2011. "Perlu dikonfirmasi lagi data itu, apakah benar sumbernya LHP BPK," ujar Humas BPK Perwakilan Kalbar, Sigit Pratama Yudha.

Data yang diungkap Sigit itu adalah per Desember 2011. Sehingga bisa jadi, nilai kerugian itu saat ini sudah jauh berkurang karena selama Januari-September ini cukup banyak pemerintah daerah yang telah mengembalikannya.

Sigit menegaskan bahwa temuan BPK, tidak berarti korupsi. Karena bagi BPK, yang terpenting kerugian negara itu dikembalikan. "Kalau uang itu dikembalikan, bagi kami itu sudah cukup. Tapi bagi penegak hukum, mungkin saja itu dinilai perbuatan korupsi," paparnya.

Setiap perbuatan yang merugikan negara, pasti ada yang bertanggungjawab. Misalnya jika yang bertanggungjawab itu adalah bendahara di suatu instansi, maka bendahara itulah yang harus mengembalikan kerugian negara.

Jika si bendahara tidak bersedia, upaya paksa bisa dilakukan seperti pemotongan gaji. Jika belum cukup juga, gaji tersebut akan dipotong dalam jangka waktu beberapa bulan hingga total kerugian negara akibat perbuatannya tertutupi. "Bahkan hartanya juga bisa disita untuk mengganti kerugian negara itu," kata Sigit.

Kajati tak yakin

Kajati Kalbar, M Jasman Pandjaitan tidak sependapat jika Kalbar disebut sebagai provinsi terkorup nomor lima di Indonesia. Apalagi jika indikatornya hanyalah temuan BPK RI, yang belum bisa disebut sebagai kasus korupsi.

Jasman lebih setuju jika indikator kerugian negara itu didasarkan pada putusan pengadilan terhadap kasus di suatu daerah. "Kalau sudah diputus pengadilan, itu baru bisa dibilang telah terjadi korupsi," katanya.

Peringkat terkorup, kata Jasman, akan lebih objektif jika dilihat dari persentase kerugian negara di suatu daerah dibandingkan dengan APBD-nya. Sebab jika peringkat didasarkan pada nilai kerugian negara, maka besar kemungkinan pro-

vinci dengan APBD terbesar akan menempati peringkat teratas.

Jika kedua hal itu yang dijadikan dasar penilaian daerah terkorup, Jasman yakin Kalbar tidak akan berada di peringkat kelima. "Saya tidak yakin Kalbar berada di peringkat lima. Karena banyak provinsi lain yang korupsinya melebihi Kalbar," ujarnya.

Jasman mengatakan, temuan BPK RI cukup membantu kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi. Selain tentu saja, informasi dari masyarakat. Namun kalau dipersentase, kasus korupsi yang ditangani kejaksaan memang lebih banyak yang berasal dari laporan masyarakat.

Contoh kasus yang berasal dari temuan BPK RI yaitu pengadaan Lapas Klas II Pontianak, yang saat ini sedang ditangani Kejati Kalbar. BPK RI menyampaikan laporan itu ke Kejagung, yang kemudian diteruskan ke Kejati Kalbar untuk ditangani.

Jasman pun kembali menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi di Kalbar. Dia berharap semua pihak mendukung upaya tersebut. "Silakan masyarakat melapor. Pasti akan kami tindaklanjuti," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo enggan menanggapi hasil temuan LSM Fitra terkait ranking provinsi-provinsi di Indonesia yang paling berpotensi korupsi. DKI Jakarta berada di urutan pertama.

"Yang berhak mengatakan itu adalah lembaga resmi. Kalau lembaga resmi tidak mengatakan hal tersebut, saya tidak akan memberikan tanggapan," tegas Foke ketika dimintai tanggapannya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/10). (hsm/ari)

DAFTAR peringkat provinsi terkorup beserta kerugian negara

Sambungan Hal. 1

14. NTB Rp 52,825 miliar
15. Sulteng Rp 52,823 miliar
16. Sulbar Rp 51 miliar
17. Gorontalo Rp 48 miliar
18. Maluku Rp 47 miliar
19. NTT Rp 44 miliar
20. Jabar Rp 32 miliar
21. Lampung Rp 28 miliar
22. Sumbar Rp 27 miliar
23. Kalsel Rp 22 miliar
24. Kalteng Rp 21 miliar
25. Banten Rp 20 miliar
26. Kepulauan Riau Rp 16,1 miliar
27. Sulut Rp 16 miliar
28. Jambi Rp 15 miliar
29. Jatim Rp 11 miliar
30. Jateng Rp 10 miliar
31. Bali Rp 6 miliar
32. DI Yogyakarta Rp 4 miliar
33. Bangka Belitung Rp 1,9 miliar